

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Informasi adalah faktor krusial yang dibutuhkan pemegang saham untuk mengambil keputusan transaksi investasi di pasar modal. Salah satu bentuk informasi perusahaan tertuang dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya yang mendukung serta memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan kepada pemegang saham dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan berisi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan informasi-informasi lain yang berhubungan dengan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh para pemegang saham untuk mengalisis sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, karena itu laporan tahunan keuangan dapat berupa posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan, dan lain-lain.

Oleh karena pentingnya suatu laporan keuangan bagi perusahaan, maka Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) X.K.2 tahun 2011, mewajibkan setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Namun, pada kenyataannya masih terdapat ketidakterbukaan dalam penyajian informasi dalam

laporan keuangan, khususnya pada pasar modal di Indonesia. Sepanjang tahun 2014, OJK telah mengeluarkan 713 sanksi administratif kepada para pelaku di industri pasar modal. Dari total 713 kasus pasar modal tersebut, terdapat 665 kasus (93%) yang menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan (OJK, 2014).

Masalah pengungkapan dan transparansi informasi ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi saham memiliki keunggulan dan kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak lain atau yang lebih dikenal dengan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Pada kondisi ini, terdapat ketidakseimbangan penerimaan informasi karena satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain.

Adanya masalah asimetri informasi membuat manajer semakin menguasai informasi yang terdapat pada perusahaan dan pihak pemegang saham semakin kesulitan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Kondisi yang demikian merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pihak pemegang saham. Hal ini dikarenakan asimetri informasi dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba yang berakibat seorang manajer mempunyai perilaku oportunistik. Perilaku ini membuat manajer bertindak untuk mencapai kepentingannya sendiri tanpa berpikir untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Barclay, Smith, dan Watts (1995) adanya asimetri informasi mengakibatkan seorang manajer mempunyai informasi yang lebih baik mengenai masa depan perusahaan dibandingkan dengan

pemegang saham. Sehingga pemegang saham cenderung membuat persepsi yang berbeda dengan manajer mengenai laba perusahaan dimasa mendatang.

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate Governance (CG)* merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 2004). Menurut *OECD Principles of Corporate Governance (2004)* terkait *disclosure* dan *transparency*, setidaknya ada enam hal yang harus diungkapkan oleh perusahaan, yaitu: (i) pengungkapan harus meliputi, tetapi tidak terbatas pada informasi material atas hasil keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham utama dan hak suara, kebijakan remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif utama, dan informasi mengenai anggota dewan, transaksi pihak-pihak terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diidentifikasi, isu-isu terkait karyawan dan pemegang saham lainnya, struktur dan kebijakan pengelolaan; (ii) informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar pengungkapan akuntansi dan keuangan dan non keuangan yang berkualitas tinggi; (iii) audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen, kompeten, dan cakap; (iv) auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional dan hati-hati; (v) saluran untuk menyebarkan informasi oleh pengguna; (vi) kerangka tata kelola perusahaan harus dilengkapi sebuah pendekatan efektif. Adanya mekanisme *corporate governance* yang baik dengan pengungkapan informasi

yang memadai dapat menyelesaikan masalah agensi dan mengurangi asimetri informasi.

Dengan adanya penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik maka perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan secara transparan dan adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Yoon, 2011). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang dapat digunakan dan diproses secara cepat dan efisien dan menyajikan informasi dalam bentuk format bahasa yang sama. Untuk mewujudkan keinginan tersebut serta mendukung terciptanya sarana dalam pelaksanaan *business intelligence* dan mempermudah pemegang saham maupun regulator dalam mengakses maupun mengolah data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan diperlukan suatu solusi terintegrasi dalam standarisasi bahasa pelaporan informasi, dalam hal ini yaitu *Extensible Business Reporting Language* (XBRL).

XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis (Hodge, Kennedy, dan Maines, 2004; Chang dan Jarvenpaa, 2005). Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Manfaat dari penggunaan XBRL ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan

(Hodge *et. al.*, 2004). XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, pemegang saham dan regulator, dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis (Farewell, 2006). XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan (Hodge *et. al.*, 2004).

Pada tahun 2009, *United States Securities and Exchange Commission* (SEC) mengeluarkan aturan penggunaan interaktif data untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, baik yang menyusun laporan keuangan menggunakan *United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP) maupun emiten yang menyusun laporan keuangan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), harus memberikan laporan keuangan dalam bentuk XBRL terhadap SEC.

Indonesia yang mengacu pada perkembangan di Amerika Serikat mulai mengembangkan persiapan implementasi XBRL sejak 2012. Sebagai langkah awal penerapan XBRL, BEI telah membuat taksonomi XBRL yang diterbitkan pada 30 April 2014. Taksonomi tersebut disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan OJK. Adapun jenis taksonomi laporan keuangan yang ada meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya taksonomi laporan keuangan ini telah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan tercatat. Pelaporan informasi laporan keuangan berbasis XBRL tersebut telah diimplementasikan

secara sukarela untuk laporan keuangan triwulan III tahun 2015 dan secara wajib untuk laporan keuangan tahun 2015. (BEI, 2014). Namun sampai akhir tanggal pelaporan laporan keuangan tahun 2015 untuk format XBRL yaitu 30 April 2015, masih terdapat 67 perusahaan dari total 480 perusahaan yang telah mengungkapkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia belum melaporkan laporan keuangan tahun 2015 dalam format XBRL (<http://www.idx.co.id/>).

Kasus *Panama Papers* berdasarkan laporan dari *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) yang terjadi tahun 2016 mengindikasikan kurangnya transparansi yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat (Sudiarta, 2016). Dengan adanya penerapan laporan keuangan berbasis XBRL, maka diharapkan akan meningkatkan transparansi perusahaan (Nitchman, 2016).

Dalam rangka meningkatkan transparansi, maka perusahaan perlu menerapkan mekanisme *corporate governance* yang baik, baik dari segi internal maupun eksternal. Salah satu indikator penerapan mekanisme internal yaitu komposisi dewan komisaris (Babic, 2001). Dewan komisaris memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dewan komisaris terdiri atas dua jenis, yaitu komisaris non-independen dan komisaris independen. Adanya komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak terkait. Komposisi dewan komisaris dilihat dari perbandingan jumlah komisaris independen terhadap komisaris non-independen. Hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan keputusan pengungkapan

informasi yang komprehensif telah diteleti sebelumnya oleh Fama dan Jensen (1983), yang menyatakan bahwa adanya dewan komisaris yang lebih kuat dan lebih independen berperan dalam pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, dengan demikian memfasilitasi pasokan informasi yang lebih baik. Boritz dan Timoshenko (2015) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan dalam format XBRL.

Di samping mekanisme internal, perusahaan juga membutuhkan penerapan mekanisme eksternal yang baik guna mendukung peningkatan transparansi. Salah satu indikator mekanisme eksternal adalah adanya kepemilikan institusional (Babic, 2005). Kepemilikan institusional ditunjukkan melalui proposi saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen perusahaan guna untuk mengurangi konflik keagenan dalam suatu perusahaan. Dengan kepemilikan saham institusional pada perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja dari manajer (Listyani, 2003). Premuroso dan Bhattacharya (2008) menemukan bahwa perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam format XBRL menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik, diukur dengan kepemilikan institusional.

Selain mekanisme *corporate governance* terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengadopsi format XBRL untuk mengungkapkan laporan keuangannya, salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan Effendi, Smith, dan Wong (2011) menguji karakteristik keuangan dari 53 perusahaan yang terdaftar pada *New York Stock Exchange*

(NYSE) yang secara sukarela melaporkan laporan keuangan dalam format XBRL. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar lebih mungkin untuk mengungkapkan laporan keuangan dalam format XBRL karena perusahaan besar cenderung memberikan perhatian lebih terhadap investor dan analisis keuangan salah satunya dengan meningkatkan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Callaghan dan Nehmer, 2014). Kaya (2014) juga menemukan bahwa keuntungan dari penggunaan format XBRL dalam pelaporan keuangan lebih dirasakan perusahaan besar yang beroperasi lintas bisnis dibandingkan untuk perusahaan kecil yang biasanya hanya memiliki bisnis tunggal. Keuntungan ini dikarenakan XBRL berperan juga dalam mengintegrasikan prosedur pelaporan bisnis yang berbeda. Hasil ini sejalan dengan penelitian Premuroso *et. al.* (2008), Ragothaman (2011), dan Harahap, Siregar, dan Utama (2011).

Di samping ukuran perusahaan, faktor lainnya adalah rasio *leverage* perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dapat mengurangi biaya monitoringnya dengan menyediakan pengungkapan yang komprehensif dan informatif. Healy dan Palepu (2001) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang berencana untuk meningkatkan utang memberikan insentif dengan meningkatkan pengungkapan informasinya. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dikatakan jika perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan pengungkapan yang informatif. Ahmed dan Courtis (1999) melakukan penelitian meta-analisis



dan menyimpulkan bahwa pengungkapan perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat utang.

Penelitian semacam ini belum pernah dilakukan di Indonesia, berhubung penerapan XBRL di Indonesia yang baru saja diimplementasikan pada tahun 2016 untuk laporan keuangan tahun 2015 (BEI, 2014). Berdasarkan uraian tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Rasio *Leverage* Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Format XBRL.**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Pengungkapan informasi yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi sehingga dapat merugikan pemegang saham karena informasi yang disajikan tersebut dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah;
2. Mekanisme *corporate governance* perusahaan yang kurang baik menyebabkan perusahaan tidak mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan secara memadai, salah satunya dalam format XBRL;
3. Ukuran perusahaan yang lebih kecil memiliki sumber daya finansial yang tidak sebesar perusahaan besar sehingga menyebabkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil cenderung tidak mengungkapkan laporan keuangan dalam format XBRL;

4. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih rendah menyebabkan pengawasan dari kreditur yang tidak sebesar perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi sehingga perusahaan tersebut kurang terdorong untuk mengungkapkan laporan keuangan dalam format XBRL.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, pembatasan masalah pada penelitian ini menggunakan komposisi dewan komisaris yang diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah total komisaris perusahaan, kepemilikan institusional yang diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, dan rasio *leverage* perusahaan yang diukur dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas sebagai variabel independen dan pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL yang diukur dengan *dummy* di mana perusahaan yang telah mengungkapkan laporan dalam format XBRL diberi nilai 1 (satu) dan bila tidak diberi nilai 0 sebagai variabel dependen. Pengamatan pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL?
2. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL?
4. Apakah rasio *leverage* perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak yang memiliki hubungan atas penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori sistem informasi akuntansi;
  - b. Menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan pengungkapan laporan dalam format XBRL.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pemegang saham, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai pengungkapan laporan dalam format XBRL dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- b. Bagi perusahaan yang terdaftar pada BEI, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai manfaat pengungkapan laporan dalam format XBRL;
- c. Bagi BEI, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran manfaat penerapan XBRL bagi pelaku pasar modal di Indonesia dan menjadi pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.